ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN MORO DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN

SKRIPSI

Oleh:
Rizky Subagia
151010012

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN MORO DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana

Oleh:
Rizky Subagia
151010012

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak alin, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang belaku di perguruan tinggi.

Batam, 21 Febuari 2020
Yang membuat pernyataan

Rizky Subagia
151010012

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN MORO DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah syarat
Memperoleh gelar sarjana

Oleh:
Rizky Subagia
151010012

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini

Batam, 21 Febuari 2020

Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si
Pembimbing

ABSTRACT

The problem of poverty in Indonesia at present is a significant problem in recent years the number of announced decreases little by little. One of the objectives of the village expansion policy is to improve community welfare. Based on data from Moro District, it can be seen from 2016 to 2019 that the number of poor families is no change with the number of poor families 1,401. This is one of the reasons researchers are interested in conducting research in the District of Moro by looking at the conditions of poverty levels in rural areas. The method used in this study is qualitative with descriptive approach. With data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This research focuses on the division of villages in reducing poverty in the Moro District. The results of this study are expected to provide additional knowledge about the impact of village division in reducing poverty and can be used as a material for policy makers to reduce the problem of poverty.

Keywords: Impact; Poverty; division

ABSTRAK

Masalah kemiskinan di Indonesia pada saat ini merupakan masalah yang cukup besar meskipun dalam beberapa tahun terakhir angka resmi menunjukkan penurunan sedikit demi sedikit. Salah satu tujuan kebijakan pemekaran desa untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Berdasarkan data dari Kecamatan Moro dapat dilihat dari tahun 2016 sampai 2019 jumlah keluarga miskin tidak ada perubahan dengan total jumlah keluarga miskin 1.401. Hal ini merupakan salah satu alasan peneliti tertarik malakukan penelitian di wilayah Kecamatan Moro dengan melihat kondisi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Objek penelitian ini melihat dari penduduk miskin yang merupakan sasaran utama kebijakan dan penduduk diluar sasaran kebijakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekantan deskriptif. Dengan teknik mengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dengan fokus dampak pemekaran desa dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Moro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang dampak pemekaran desa dalam mengurangi angka kemiskinan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para aktor kebijakan untuk mengurangi masalah kemiskinan.

Kata Kunci: *Dampak; Kemiskinan; Pemekaran*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih juh dari sempurna, karena itu kritik dan saran senantiasa penulis terima dengan senang hati dengan segala keterbatasan, penuliis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.S.I Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si Selaku Pembimbing Skripsi Dan Pembimbing Akademik Pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis menuntut Ilmu di Universitas Putera Batam.
4. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak/ibu Dosen pengajar Di Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman serta motivasinya.
6. Bapak Amad selaku KASI PMD yang Telah Memberikan waktu luang untuk memberikan informasi terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa-desa di Kecamatan Moro.
7. Bapak Sahlan selaku kepala desa Pulau Moro yang telah memberikan izin penelitian di wilayah desa ini dan sekaligus memberikan informasi terkait penelitian ini
8. Bapak Rajab selaku kepala desa Niur permai yang telah memberikan izin penelitian di wilayah desa ini dan sekaligus memberikan informasi terkait penelitian ini
9. Bapak Syahrudi selaku kepala Desa Buluh Patah yang telah memberikan izin penelitian di wilayah desa ini dan sekaligus memberikan informasi terkait penelitian ini.
10. Bapak Romi Selaku Kepala Dusun Desa Pulau Moro.
11. Bapak Rizal Selaku BPD Desa Niur Permai.
12. Bapak Raju Selaku Anggota BPD Desa Buluh Patah.
13. Ibu Yanti selaku informan sekaligus masyarakat miskin di Desa Pulau Moro.
14. Bapak Samsul selaku informan masyarakat sekaligus miskin di Desa Niur Permai.

15. Bapak Kiman selaku informan sekaligus masayarakat miskin di Desa Buluh Patah.
16. Bapak Rian Selaku informan dengan kondisi perkonomian sudah membaik tau berada diluar garis kemiskinan yang bertempat tinggal di Desa Pulau Moro.
17. Ibu Misnarti selaku informan dengan kondisi perkonomian sudah membaik tau berada diluar garis kemiskinan yang bertempat tinggal di Desa Niur Permai.
18. Bapak Rais selaku informan dengan kondisi perkonomian sudah membaik tau berada diluar garis kemiskinan yang bertempat tinggal di Desa Buluh Patah.
19. Bapak Arsad Selaku Tokoh Adat Desa Pulau Moro.
20. Bapak Sulardi Selaku Tokoh Adat Desa Niur Permai.
21. Bapak Samsuden Sealu Tokoh Adat Desa Buluh Patah.
22. Kedua orang tua penulis Bapak Sumadi dan Rogayah, Misnarti dan Dwi Suranti merupakan kakak kandung penulis dan keluarga besar Nenek Miah yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta mendoakan agar tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.
23. Teman-teman Prodi Administrasi Negara angkatan 2015 khusunya Debbya Chintia dan Widiah Putri Lestari sekaligus teman seperjuangan penulis.

24. Saruan, Devi Purnamawati dan Irfan Aldiansyah teman terdekat penulis yang selalu memberikan semangat.
25. Teman sepermainan dan sahabat penulis Tarjuki, Aidil, Rudi Sutuno, dan Indra Lesman yang selalu memberikan support agar giat mengerjakan tulisan ini.
26. Serta semua pihak yang memberiakan masukan, kritikan dan bantuan yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan dan memberikan hidayah dan karunia-Nya, Amin.

Batam, 21 Febuari 2020

Rizky Subagia

DAFTAR ISI

ABSTRACT v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR SINGKATAN xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah. 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penulisan 7
1.4.1 Manfaat Teoritis 7
1.4.2 Manfaat Praktis 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Teori Kebijakan 9
2.1.1 Ciri-ciri Umum Kebijakan 10
2.1.2 Unsur –Unsur Kebijakan 11
2.1.3 Dampak Kebijakan Publik 12
2.2. Proses Kebijakan Publik 16
2.3 Analisis Kebijakan Publik 19
2.3.1 Proses Analisis Kebijakan 20
2.4 Teori Otonomi Daerah 21
2.4.1 Otonomi Desa 23
2.5 Teori Kemiskinan 24
2.5.1 Kategori Kemiskinan 24
2.5.2 Penyebab Kemiskinan 26

2.6 Penelitian Terdahulu 28
2.7 Kerangka Pemikiran 32
BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Jenis Penelitian 33
3.2 Fokus Penelitian 33
3.3 Sumber Data 34
3.4 Metode Analisis Data 41
3.5 Teknik Pengumpulan Data 42
3.6 Keabsahan Data 42
3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian 43
a) Lokasi 43
b) Jadwal Penelitian 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
4.1 Hasil Penelitian 45
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Moro 45
4.1.2 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga 46
4.1.3 Penyebaran Penduduk 47
4.1.4 Luas Daratan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan MoroTahun 2019 48
4.1.5 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49
4.1.6 Dampak Pemekaran Desa Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan 49
4.2 Pembahasan 61
4.2.1 Kelompok Target Atau Masyarakat Miskin 61
4.2.2 Dampak Bagi Masyarakat Diluar Target 63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 66
5.1 KESIMPULAN 66
5.2 SARAN 67
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....17

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....32

Gambar 2.3 Jadwal Penelitian.....44

Gambar 4.1 Kelompok Usaha Bersama Desa Niur Permai 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Moro 3

Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Miskin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Moro.. 4

Tabel 1.3 Persentase keluarga Miskin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Moro 4

Tabel 3.1 Tabel Informan..... 36

Tabel 4.1.4 Tabel Luas Daratan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan MoroTahun 2019..... 48

DAFTAR SINGKATAN

BPD	: Badan Pengawas Desa
KADES	: Kepala Desa
KASI PMD	: Kepala Organisasi Pemberdayaan Masyarakat
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
P3MD	: Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
PANSIMAS	: Persediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PLN	: Perusahaan Listrik Negara.
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
POLINDES	: Poli Klinik Desa
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan menyelengarakan urusan pemerintahannya sendiri. Dengan diberlakukannya otonomi daerah berarti memperkuat fungsi pemerintah daerah dalam mengambil dan membuat kebijakan guna mecapai sebuah tujuan daerahnya masing-masing. Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah dengan terwujudnya kehidupan yang lebih baik, lebih adil dalam memperoleh penghasilan/pendapatan, terlindungnya dari segala gangguan, dan terciptanya rasa aman dan lingkungan hidup yang nyaman (Widjaja, 2014).

Pemekaran daerah merupakan salah satu dari konsekuensi kebijakan otonomi daerah, pemekaran daerah juga berarti memberi kesempatan daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Pemekaran daerah ini memungkinkan dilakukannya percepatan pembangun infrastruktur sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi didaerahnya. Dengan demikian, pemekaran daerah seharusnya terus meningkatkan kesejahtraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Pemekaran wilayah juga seharusnya membawa dampak yang positif dalam penurunan angka kemiskinan dengan senantiasa

melakukan pemberdayaan daerah dengan aktif menggali, mengolah dan mengembangkan setiap potensi yang ada di daerah agar meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

Hubungannya dengan kemiskinan adalah pemerintah daerah diberikan wewenang bebas untuk membentuk lapangan kerja dan program kerja yang bisa membantu dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Tetapi tidak semua pemekaran desa benar-benar mengatasi masalah masalah kemiskinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sapi'i, Makmur, 2014). Setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif dan negatifnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan penelitian di desa pecahan yaitu Desa Bagoerejo Kecamantan Gumukmas Kabupaten Jember. Semenjak dilakukan pemekran desa di Desa Bagoerejo hal-hal positif banyak berdampak di desa ini, yaitu pengaspalan jalan, pembangunan posyandu, pembangunan pasar dan lain-lain, sementara dampak negatif dari pemekaran desa yaitu kesenjangan perolehan pendapatan perekonomian menjadi tidak merata, hal ini disebabkan pembangunan antar wilayah juga tidak merata diantaranya pembangunan infrastruktur jalan yang kurang ditingkatkan tiap tahunnya di Desa Bagoerejo ini.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2012, pada tahun 2012 lalu Kecamatan Moro merupakan Kecamatan yang paling banyak melakukan pemekaran desa dibandingkan kecamatan yang lain di Kabupaten Karimun. Pada tahun 2012 lalu Kecamatan Moro telah memekarkan desa sebanyak 4 desa baru. Hal ini merupakan sesuatu masalah yang menarik untuk

diteliti, hal ini disebabkan karena melihat data kemiskinan di Kecamatan Moro dari data tahun 2014 sampai 2019 tidak ada perubahan jumlah keluarga miskin, dengan total jumlah 1.401 keluarga

Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Moro

No	**TAHUN**	**JUMLAH KELUARGA**
1	2016	1401
2	2017	1401
3	2018	1401
4	2019	1401

(Sumber Kantor Camat Kecamatan Moro)

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa angka kemiskinan di kecamatan Moro ini tiap tahunnya relatif stagnan, hal ini dapat dilihat dari data tahun 2016-2019. Belum diketahui seacara pasti apa penyebabnya, hadirnya penelitiaan ini adalah untuk melihat apakah penurunan kemiskinan di Kecamatan Moro ini disebabkan oleh kebijakan pemekaran desa yang dilakukan serentak pada tahun 2012 lalu atau bahkan disebabkan oleh faktor lain.

Tabel 1.2 Jumlah Dan Persentase Keluarga Miskin Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Moro Tahun 2019

No	Nama Desa	Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan	Jumlah Keluarga Miskin	Persentase
1	Moro	1.178	194	16
2	Moro Timur	959	149	15
3	Pulau Moro	258	137	53
4	Pauh	415	114	27
5	Sugie	488	154	31
6	Keban	364	122	33
7	Niur Permai	314	108	34
8	Rawa Jaya	246	96	39
9	Selat Mie	443	68	27
10	Buluh Patah	186	21	11
11	Tanj. Pelanduk	222	101	45
12	Jang	573	137	23
13	Jumlah	5.646	1.401	24

(Sumber: Kantor Camat Kecamatan Moro)

Grafik 1.3 Presentase Jumlah Keluarga Miskin Di Kecamatan Moro Tahun 2019

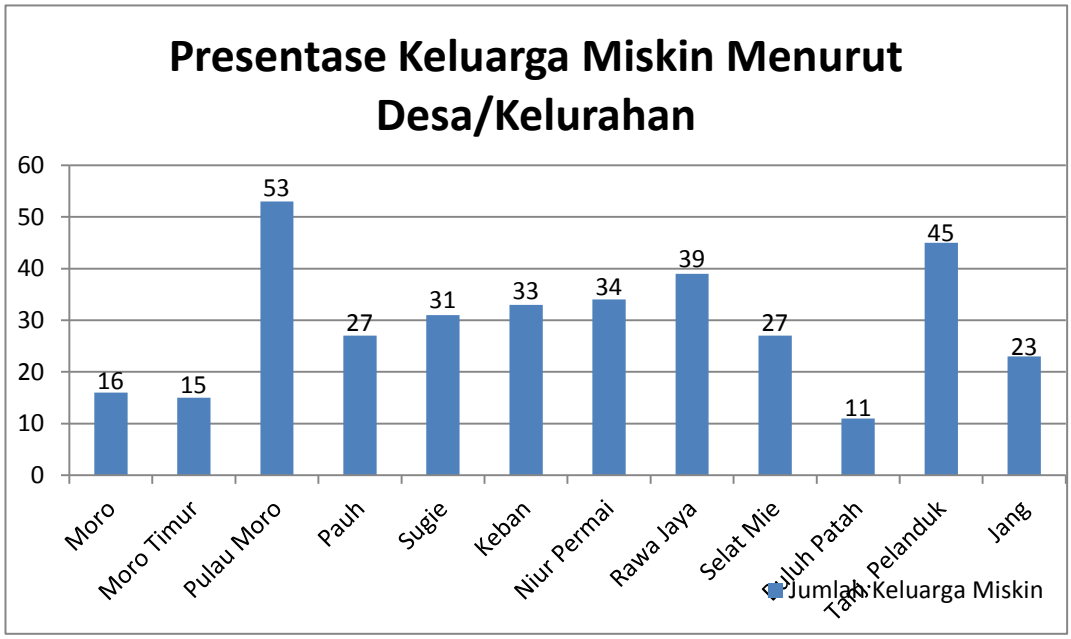

(Sumber: Kantor Camat Kecamatan Moro)

Dari grafik 1.3 diatas dapat dikatakan bahwa kecamatan Moro ini memiliki jumlah desa dan kelurahan sebanyak 12 desa. Dari ke 12 desa tersebut desa Pulau Moro memiliki jumlah presentasi keluarga miskin terbanyak, yaitu mencapai 53% dari total jumlah keseluruhan keluarga, sedangka Desa Buluh Patah sendiri memiliki persentase jumlah keluarga miskin paling sedikit jika dibandingkan dengan desa desa lain, desa ini memiliki persentase 11% jumlah keluarga miskin dari total keseluruhan keluarga.

Terkait masalah kemiskinan ini, sudah banyak para ilmuwan yang meneliti, baik dari penyebab sampai ke solusi dalam mengatasi kemiskinan dalam jangkauan wilayah desa maupun nasional, dalam hal ini penulis membagi ke dalam 5 kelompok penelitian terkait dampak sebuah kebijakan dalam menenurunkan angka kemiskinan di wilayah pedesaan yaitu *Pertama*, penelitian yang membahas dampak kebijakan pemekaran terhadap pembangunan infrastruktur. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sagay, Dua, & Tenga, 2018), (Imam Sapi'i, 2013), (Siti Nusantara Bakti, 2018), (Made Mudana, Tibertius Nempung, 2016) dan (Nur Lailatul Amubarokah 2015). *Kedua*, penelitan yang membahas tentang program pembangunan ekonomi masyarakat seperti penelitian yang dilakukan oleh (Neti & Cahyadinata, 2016), (Ratri Furry P.R & Hadi Susana, 2014) dan (Hakim, Hamidi, & Tampubolon, 2017). *Ketiga*, Terkait Program Pengentasan Kemiskinan Seperti Penelitian Yang Dilakukan Oleh (Murdiansyah, 2014), (Rosalia Indriyati, 2015), (Intan Mala Sari & Muhamad Faisal Abdullah, 2017), (Atma Ras, 2013), (Putra & Abbas, 2019) dan (Arif Eko Wahyudi & Ahmad Riyadh, 2014). *Kempat*, Penelitian Terkait Sreategi

Penurunan Angka Kemiskinan (Nur Firdaus, 2014), (Margo Tando, 2016), (Putra & Abbas, 2019) dan (Ahmad Soleh, 2014). Kelompok penelitian. *Kelima*, yaitu terkait dampak pemekaran desa dalam mensejahtrakan masyarakat seperti penelitian yang dilakuan oleh, (Huda & Nurani, 2019), (Murdiansyah, 2014), (Nuraeni, Nasir, Asrian, 2019) dan (Muhammad Ikram, 2019). Pada saat ini sudah banyak yang melakukan penelitian sebelumnya terkait dampak pemekaran desa. Penelitian dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh (Huda & Nurani, 2019), (Murdiansyah, 2014), (Nuraeni, Nasir, Asrian, 2019) dan (Muhammad Ikram, 2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas yang membahas terkait masalah kemiskian, tetapi hanya sedikit yang membahas tentang dampak dari sebuah kebijakan pemekaran desa yang berangkat dari otonomi daerah dalam mengurangi angka kemiskinan. Melihat kondisi kemiskinan di Kecamatan Moro ini yang belum memiliki jumlah penurunan angka kemiskinan di tahun-tahun sebelumnya, sangat di sayangkan bahwa sangat sedikit yang meneliti terkait masalah kemiskinan di Kecamatan Moro, terutama setelah dilakukannya pemekaran desa, yang memang pemekaran desa ini dilakukan serentak pada tahun 2012 lalu. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena bertujuan untuk untuk menganalisis dan mendalami bagaimana dampak pemekaran desa dalam mengurangi angka kemiskinan di beberapa desa di kecamatan Moro dan mengarah kepada bagaimana perkembangan desa ini setelah mekar khususnya untuk mengurangi angka kemiskinan

Berdasarkan beberapa tujuan dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mendalami dan menganalisi terkait masalah kemiskinan di Kecamtan Moro. Agar hasil penelitian ini menjadi sebuah acuan bagi pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan didaerahnya dan menjadi sumber bacaan kedepannya bagi masyarakat dan para peneliti selanjutnya. Berdasarkan latar belakang diatas, dengan tema pengentasan kemiskinan. Karena salah satu tujuan utama pemekaran desa adalah untuk mengentasi kemiskinan. Maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian yaitu: **Analisis Dampak Pemekaran Desa Di Kecamatan Moro Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana dampak pemekaran desa dalam mengurangi angka kemiskinan di beberapa desa di Kecamatan Moro?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami bagaimana dampak pemekaran desa dalam mengurangi angka kemiskinan di beberapa desa di kecamatan Moro.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini di bagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan pengetahuan mengenai dampak pemekaran desa dalam megurangi angka kemiskinan di Kecamatan Moro.

2. Memberikan pengetahuan mengenai kondisi kemiskinan di Kecamatan Moro pada saat ini.
3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan judul yang relevan dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi wilayah Kecamatan moro sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan dalam menanggulangi masalah kemiskinan berdasarkan wilayah pedesaan.
2. Bagi masyarakat, merubah cara pandang masyarakat, mengingat pentingnya peran masayarakat untuk ikut serta dalam melakukan pembangunan wilayah mereka agar terciptanya masyarakat yang sejahtra.
3. Bagi Universitas Putera Batam sebagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk dapat mengetahui bagaimana dampak kebijakan pemekaran desa di Kecamatan Moro dalam mengurangi angka kemiskinan dan sebagai sumber pengetahuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kebijakan

Menurrut Thomas R DYE menyebutkan bahwa kebijakan suatu pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu *(whatever goverments choose to do or not to do).* Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain David Easton, Lasswell dan Kaplan menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai "kekuasaan pengalokasian nila-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan". Sementara itu Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai program yang di proyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik *(a projected program of goals, values and practices).* Sedangkan Frederick mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan *(goals),* sasaran *(objective),* atau kehendak *(purpose.* Wiliam N Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengalaman dalam kehidupan sesehari-hari, ia mendefinisikan analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan metode untuk menghasilkan dan mentranformasikan informasi yang relevan dalam pemecahan persoalan sehari-hari (Abidin 2012:5).

Kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan, Kebijakan publik merupakan sesuatu yang dibuat dan direncanakan oleh pemerintah berdasarkan perencanakan, penyusunan, implementasi dan evaluasi demi

mencapai sebuah tujuan tertentu atau untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi.

2.1.1 Ciri-ciri Umum Kebijakan

Ciri-ciri umum merupakan keterangan yang menujukkan sifat khusus dari sesuatu. Menurut Anderson dalam (Abidin 2012:22) atas pertimbangan tersebut mengemukakan bahwa beberapa ciri-ciri umum dari kebijakan sebagai berikut:

1. Setiap kebijakan harus memiliki tujuannya. Artinya pembuatan kebijakan harus penuh dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam artian tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya tanpa adanya tujuan pembuatannya.
2. Sebuah kebijakan harus berdiri sendiri dengan terpisah dari kebijakan lainnya, namun berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan berorientasi pada implementasi, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan berupa apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
4. Kebijakan dapat berupa negatif atau melarang dan juga dapat berbentuk pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

Kebijakan ini harus memiliki tujuan untuk kepentingan atau mengatasi suatu masalah tertentu, kebijakan juga harus berdiri sendiri tidak boleh bertumpang tindih anatar kebijakan, kebijakan merupakan sesuatu yang sudah

diimplementasikan, kebijakan juga dapat berbentuk melarang dan juga dapat berbentuk menganjurkan berbuat sesuatu.

2.1.2 Unsur –Unsur Kebijakan

Menurut (Abidin 2012:25) sebagai sistem yang terdiri dari subsitem, dilihat dari segi struktur kebijakan terdapat lima unsur-unsur kebijakan:

1. Tujuan kebijakan, bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tidak ada tujuan tidak ada kebijakan, tujuan menjadi unsur utama dari suatu kebijakan.
2. Masalah kebijakan, masalah adalah unsur yang sangat penting dalam kebijakan, kesalahan dalam menentukan masalah dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Dengan cara lain dikatakan bahwa jika masalah sudah dapat diidendifikasikan maka dapat dikatakan sebuah pekerjaan dianggap sudah selesai.
3. Tuntutan dari kebijaksaan *(demand).* Partisipasi dapat berupa dukungan, tuntutan, dan tantangan atau kritik. Tuntutan muncul karna dua sebab yaitu:
   a. Karena terabaikan kepentingan
   b. Munculnya suatu kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan sebelumnya tercapai.
4. Dampak (*outcome).* Dampak ditimbulkan dari tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan. Secara visual dapat ditunjukkan jika anda melempar sebuah batu kekolam yang airnya tenang. Pengaruh dari jatuhnya batu akan menimbulkan ria didalam air

yang meluas disekitar tempat jatunya batu tersebut. Besar dampak yang terjadi untuk setiap kebijakan sulit ditetapkan. Hal ini karena hal-hal berikut ini:

a. Tidak tersedianya informasi yang cukup. Mungkin dapat berupa data dilapangan pada tingkat lokal atau tidak ada data di instansi tingkat nasional dan daerah.
b. Dalam bidang sosial, pengaruh suatu kebijakan sulit dipisahkan dengan pengaruh kebijakan lain. Oleh karena itu, untuk menilai suatu dampak dari kebijakan perlu dilakukan pemisah antara kelompok variabel yang diukur dengan variabel yang tidak diukur.
c. Proses berjalannya suatu kebijakan dalam bidang sosial sulit diamati. Proses tersebut berbeda dalam setiap masyarakat dan setiap sektor.

5. Sarana atau alat kebijakan. Beberapa sarana yang dimaksud adalah kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan dari suatu kebijkan itu sendiri.

Kebijakan seharusnya memiliki tujuan dan harus mengatasi masalah publik. Setiap kebijakan pasti memiliki dampat, dampak ini dapat berupa masa sekarang dan masa mendatang. Penilaian sebuah kebijakan berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari output kebijakan ini atau dampak dari kebijakan.

2.1.3 Dampak Kebijakan Publik

Untuk melihat sebuah dampak dari kebijakan publik ditetapkan dengan beberapa kriteria, kriteria ini menurut Wiliam N dunn dalam buku (Islami, 2014:280) diantaranya adalah:

a. Efektivitas, yaitu terkait sejauh mana pelaksanaan kebijakan telah menghasilkan dampak terhadap penurunan kemiskinan
b. Efisiensi, seberapa besar upaya yang dilakukan untuk menghasilkan dampak yang diinginkan. Berdasarkan modal yang dikeluarkan dengan capaian hasil yang didapatkan
c. Ketepatan, seberapa besar ketepatan capaian dampak kebijakan untuk mengatasi maslah kemiskinan ini.
d. Keadilan, yaitu apakah dampak kebijakan ini sudah tersalurkan secara adil diantara kelompok-kelompok yang berbeda.
e. Responsivitas, yaitu berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap kebijkan tersebut.
f. Kecocokan, yaitu apakah dampak yang diinginkan benar-benar cocok dengan apa yang diharapkan.

Dampak kebijakan merupakan hasil atau pengaruh yang ditimbulkan setelah dilaksanakannya sebuah kebijakan. Menurut Thomas R. Dye dalam (Anggara, 2014:294) menyebutkan dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang disebabkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Kegiatan ini diukur dengan kriteria tertentu. Angka yang tercatat hanya memberikan sedikit informasi mengenai *outcome* atau dampak kebijakan publik. Karena itu untuk melihat dampak kebijkan perlu memperhatikan perubahan yang terjadi dilingkungan atau sistem politik yang disebabkan dari aksi politik tersebut. Menurut Thomas R. Dye terdapat beberapa kriteria untuk mengukur dampak kebijakan dengan melihat beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

a. Dampak kebijakan terhadap suatu kondisi atau kelompok target.

Objek yang dimaksud adalah masyarakat kurang mampu atau lebih tepatnya masyarakat miskin, masyarakat miskin (berdarkan karakter tertentu). Para pengusaha kecil, kelompok anak-anak sekolah yang termarginalkan, dan lain-lain. Implikasi kebijakan terihat dari upaya program-program yang mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, memudahan akses masyarakat terhadap akses pendanaan-informasi-pasar-jaringan. Kemudian kemudahan akses terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, kemudahan penyediaan hak-hak dasar masyarakat miskin, untuk meningkatan kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial, sarana dan prasarana, faktor lingkungan, pendidikan, perwakilan hak politik dan kebutuhan lainnya.

b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain kelompok target.

Faktanya, dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program telah melibatkan secara langsung dan tidak langsung berbagai pihak, temasuk pengusaha, pemerintah, kontraktor, aparat pemerintahan, tokoh masyarakat, penyuluhan kesehatan, kontraktor guru, konsultan dan sebagainya.

c. Dampak kebijakan pada kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang.

Dampak kebijakan pengentasan kemiskinan melalui beberapa program telah menguatkan fondasi ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin khusunya. Dapat dikatakan bahwa dampak positif dari kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut meneguhkan

keinginan masyarakat dalam merespon gagasan yang sudah dimulai sejak tahun 1999. Sulit mengukur dampak langsung dari sebuah kebijakan dikarenakan dampak dari sebuah kebijakan tidak saja bersifat sekarang tetapi dapat berdampak pada masa depan.

Penilaian dampak kebijakan merupakan sebuah proses penilaian sebuah perubahan bersih dari sebuah kebijakan yang telah mempengaruhi kondisi dari wilayah setelah dilaksanakan sebuah kebijakan dengan meninjau kembali kondisi sebelum dan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Menurut (Islamy,2018:30) ada beberapa metode yang dipakai untuk menilai dampak dari sebuah kebijakan, yaitu:

1. Membandingkan antara suatu masalah, situasi, dan kondisi dengan apa yang telah terjadi sebelum intervensi atau kebijakan dilaksanakan.
2. Melakukan eksperimen guna menguji sebuah kelompok tertentu terhadap apa yang telah terjadi pada suatu area atau kelompok yang bukan menjadi sasaran intervensi.
3. Mengukur biaya dan manfaat yang diperoleh yang telah terjadi sebagai hasil dari sebuah intervensi.
4. Menggunakan model-model tertentu untuk memahami dan menjelaskan tentang apa yang telah terjadi pada kebijakan masa lalu.
5. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan atau program.
6. Membandingkan apa yang telah terjadi (dampak yang diperoleh) pada tujuan-tujuan kebijakan atau program tertentu.

7. Menggunakan tolak ukur kinerja untuk menilai apakah tujuan-tujuan atau target-target telah tercatat.

Penilaian dampak kebijakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mengukur sejauh mana pengaruh yang dihasilakan dari kebijakan sebagaimana yang dinginkan oleh mereka yang menginginkan dan menerima kebijakan tersebut. Apakah penerima kebijakan telah mendapatkan perubahan yang signifikan atau bahkan mereka mendapat kerugian dari hadirnya kebijakan tersebut.

2.2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Para ahli berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokkan tahap-tahap tersebut. Namun demikian, umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat di bedakan ke dalam lima tahap tahap berikut ini: penentuan agenda *(agenda setting)*, perumusan alternatif kebijakan *(policy formulation)*, penetapan kebijakan *(policy legitimation)*, dan penilaian atau evaluasi kebijakan *(policy evaluation).* Selengkapnya rangkaian proses pembuatan kebijakan pubik tersebut secara skematis menurut (Muclis 2013:79) tersaji pada gambar dibawah ini;

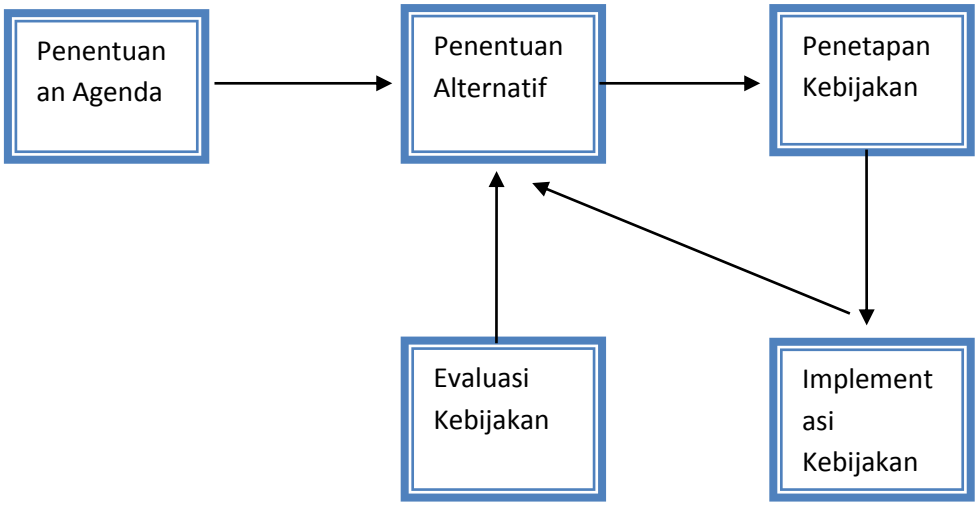

Gambar 2.1 Proses Pembuat Kebijakan Publik

Berikut penjelasan dari proses pembuatan kebijakan menurut (Muclis 2013:79):

a. *Penentuan Agenda*

Agenda dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai daftar perihal atau masalah. Proses ini dimulai dari kegiatan pendefinisian masalah, yakni kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan dan perumusan isu-isu yang perlu untuk di perhati kan oleh pemerintah. isu-isu tersebut senyatanya merupakan keadaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Keadaan tersebut di rasakan oleh masyarakat atau sebagian besar masyarakat sebagai suatu ketidak nyamanan, yang kemudian dapat memunculkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk mengubah keadaan tersebut melalui tindakan-tindakan pemerintah.

b. *Formulasi Kebijakan*

Merupakan proses perumusan suatu pilihan atau alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan. Dapat disebutkan dua kegiatan utama dalam

formulasi kebijakan. *Pertama*, perancangan tujuan yang meliputi dengan rumusan masalah kebijakan, namun perancangan tujuan kebijakan akan dapat berbeda dari rumusan masalah kebijakan. *Kedua* formulasi kebijakan sekaligus juga menyangkut strategi pencapaian tujuan kebijakan. Perumusan alternatif biasanya didasarkan pada hasil dari kegiatan peramalan mengenai kondisi yang perlu atau dapat diwujudkan berkaitan dengan pemecahan masalah.

c. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadapt alternatif kebijakan yang tersedia. Penetapan memiliki dua makna. *Pertama*, penetapan kebijakan merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan suatu pola tindakan tertentu atau sebaliknya. *Kedua*, penetapan kebijakan berkaitan dengan pencapaian konsensus dalam pemilihan alternatif yang tersedia. Tahap ini juga berkenaan dengan legitimasi dari alternatif yang dipilih, yakni berupa suatu rancangan yang ditetapkan menjadi sebuah praturan perundang-undangan.

d. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan atau biasa juga disebut sebagai implementasi kebijakan bersangkut paut dengan pencapaian sebuah tujuan tertentu. Tahap pelaksanaan kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan dapat disebutkan juga sebagai suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan berarti menilai kembali dengan melihat akibat-akibat dan hasil dari sebuah kebijakan. Evaluasi atau penilaian kebijakan akan menimbulkan umpan-balik untuk menentukan apakah keputusan tersebut perlu diteruskan atau bahkan dihentikan.. Menurut Rossi dan Freeman terdapat empat alasan kenapa evaluasi dilakukan. Keempat alasan praktis tersebut sebagai berikut.

1. Evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan program yang sedang berlangsung dan untuk melihat kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya.
2. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif.
3. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dari administrasi dan manajemen program.
4. Evaluasi dilakukan untuk memenuhi berbagai persyaratan akuntabilitas.

2.3 Analisis Kebijakan Publik

Analisis merupakan sebuah pemecahan suatu masalah guna mencari alternatif pemecahan masalah. Menurut Weimer dan Vinning dalam (Muchlis, 2013:113) menyebutkan analisis kebijakan merupakan sebuah nasihat *(advice)* yang berorientasi pelanggan yang relevan dengan keputusan-keputusan publik dan didasarkan nilai-nilai sosial. Selanjutnya Weimer & Vining menyebutkan bahwa seorang analisis kebijakan harus memiliki keterampilan dalam lima hal berikut ini.

1. Kemampuan untuk meletakkan masalah sosial yang dipersepsikan dalam konteks yang tepat.
2. Keterapilan teknis yang memungkinkan untuk memprediksi dan mengevaluasi konsekuensi dari berbagai kebijakan alternatif.
3. Kemampuan untuk mengkomunikasikan secara secara efektif hasil analisisnya kepada masyarakat dan kepada para pembuat keputusan publik.
4. Kemampuan untuk memahami konsep politik dan kelembagaan didalam melaksanakan kebijakan.
5. Memiliki etika profesi untuk membimbing interaksi dengan klien.

2.3.1 Proses Analisis Kebijakan

Menurut (Muchlis, 2013:115), mengatakan analisis kebijakan merupakan proses untuk mendapatkan rekomendasi bagi pemecah masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Sebagai suatu proses, analisis kebijakan dipahami sebagai rangkaian kegiatan atau tahap yang disimulkan kedalam tiga langkah utama atau biasa disebut sebagai wujud dari masalah kebijakan atau *(policy paper atau policy brief)*, berikut ketiga langkah utama diantaranya.

a. Perumusan Masalah Kebijakan.

   Merupakan suatu proses untuk mendefinisikan suatu kondisi sebagai suatu ketidak nyamanan yang harus dan dapat diselesaikan jalan keluarnya.

b. Perumusan Alternatif Kebijakan

   Faktor yang dicermati dalam penyusunan kebijakan menurut Dunn adalah tujuan, biaya, kendala, efek samping, waktu, resiko/ ketidak pastian.

c. Pemilihan Alternatif Kebijakan.

Yaitu meliputi pertimbangan dampak dan akibat dari pengambilan alternatif .

2.4 Teori Otonomi Daerah

Otonomi dalam arti luas yaitu “berdaya” atau bisa disebut sebagai kemandirian. Menurut (Sjafrizal, 2014:105) mengatakan bahwa, maksud otonomi daerah menyangkut dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri *(own laws)* dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri *(self government)* untuk itu otonomi daerah pada dasarnya adalah hak atau wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom.

Menurut (Widjaja, 2013:58) tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Otonomi daerah dikatakan berhasil jika telah terwujudnya kehidupan yang lebih baik, lebih adil dalam memperoleh penghasilan/pendapatan yang sesuai agar terciptanya rasa aman, lingkungan hidup yang nyaman dan terlindungnya dari segala gangguan. Menurut suwandi dalam (Anggara,2014:302) filosofi dari otonomi daerah adalah:

1. Eksistensi pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahtraan masyarakat secara demokratis.
2. Setiap kewenangan yang diberikan pusat ke daerah harus mampu menciptakan kesejahtraan dan demokrasi.
3. Pelayana publik yang baik dapat menimbulkan kesejahtraan
4. Pelayanan publik dapat juga berupa pelayanan dasar maupun bersifat pengembangan sektor unggulan.

Menurut (Sahya,Anggara 2014:305) mengemukakan beberapa dampak positif dan negatif dari kebijakan desentralisasi dan otonoimi daerah diantaranya:

1. *Dampak Negatif*
   a. Adanya kesempatan bagi oknum-oknum dipemerintahan daerah untuk melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan rakyat dan negara seperti KKN.
   b. Ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara, yang dapat mengakibatkan pertentangan antara daerah dan daerah lain.
   c. Dengan sistem otonomi daerah, pemerintah pusat sulit untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
   d. Otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang terlalu jauh antar daerah
   e. Otonomi daerah juga dapat menimbulkan persaingan antar daerah yang dapat memicu perpecahan.
2. *Dampak Positif*

Hasil kajian Irda dalam (Anggara 2014:306), menunjukkan otonomi berhasil mendorong terwujudnya tiga kondisi penting, yaitu sebagai beriku.

   a. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses politik pada ditingkat lokal.
   b. Perangkat pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat supaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Pemerintah daerah saling bekerja sama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

2.4.1 Otonomi Desa

Otonomi desa memiliki konsep bahwa sebuah kewenangan pemerintahan desa untuk lebih mandiri lagi dan berdiri sendiri dengan kemampuan memanfaatkan potensi SDM dan SDA yang ia miliki. Dalam (Nadir, 2014) Menyebutkan Otonomi Desa lebih dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan sedapat mungkin didasarkan pada kemampuannya sendiri dengan mengurangi intervensi pihak luar, berdasarkan wewenang yang dimilikinya dengan berdasarkan pada peraturan yang berlaku Pemberlakuan kebijakan otonomi desa juga menimbulkan berbagai tanggapan serta pandangan baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, tentang dampak ataupun hal-hal yang ingin dicapai dari penerapannya.

Dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 pasal 16 dijelaskan kewenangan desa, diantaranya:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut BPS dalam buku (Kuncoro, 2014) bahwa untuk mengukur kriteria garis kemiskinan ini BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang di belanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dengan patokan 2.100 kalori perhari. Dan kebutuhan bukan makanan yaitu pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dengan pendapatan minimal Rp 1.900.000

2.5.1 Kategori Kemiskinan

Kategori kemiskinan dapat dibagi kedalam beberapa kategori, menurut (Zamzam, 2018) mengelompokkan kategori kemiskinan menjadi 5 kelompok, diantaranya:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut tidak hanya dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang dapat membuat seseorang dapat hidup layak, hal ini juga ditentukan dari tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan batas antara keadaan yang disebut garis kemiskinan atau biasa disebut miskinan. Seseorang disebut masuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis

kemiskinan dan pendapatan mereka tida dapat memenuhi untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar yaitu seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.

b. Kemiskinan Relatif

Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan berada pada garis kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah jika dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk kategori miskin absolut atau tidak. Kemiskinan relatif ini terjadi karena adanya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin atau dikenal dengan istilah ketimpangan distribusi pendapatan.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Mereka berpegang teguh atas norma-norma dan budaya mereka yang sudah dianut secara turun temurun.

d. Kemiskinan kronis

Kemiskinan kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif. Keterbatasan sumber daya dan keterisolasian (daerah dengan keterbatasan sumber daya alam dan daerah terpencil).

e. Kemiskinan sementara

Masalah kemiskinan ini diakibat adanya Perubahan roda pekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, Perubahan yang bersifat musiman,

perubahan ini dapat berupa bencana alam atau timbulnya suatu dampak yang dapat menyebabkan perubahan tingkat kesejahteraan dalam masyakat

2.5.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut (Kuncoro, 2014:245) mencoba mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya *ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya* yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitanya rendah. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam *kualitas sumber daya manusia.* Kualitas sumber daya yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang giliran upahnya juga rendah. Kemiskinan muncul akibat *perbedaan akses dalam modal,* teori ini muncul bermuara dari teori lingkaran setan. Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar dan kurangya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas.

Negara berkembang biasanya masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat pembangunan ekonomi, maka akan cenderung rendahnya produktivitas, turunnya pandapatan rill, rendahnya tabungan, dan investasi juga mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju kekurangan modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

Penyebab kemiskinan ini juga dikelompokkan menjadi 6 kelompok dalam artikel (Zamzam, 2018) diantaranya sebagai berikut:

a. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang begitu rendah dapat menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi terhadap pendapatan dan dunia kerja.

b. Malas Bekerja

Adanya sikap malas bekerja dan bergantung pada nasib dapat mengakibatkan sesorang bersifat acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

c. Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat mengalami kemiskinan jika sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyakat itu miskin karena terbatasnya sumber daya alam yang mereka miliki.

d. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa akan membawa sebab kemiskinan terhadap masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini seseorang harus bisa menyediakan lapangan kerja baru sedangkan secara nyata hal sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan dan modal.

e. Keterbatasan Modal

Keterbatasan dalam memiliki modal dapat mempengaruhi seseorang untuk melengkapi alat maupun bahan untuk menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan tujuan untuk menambah penghasilan dalam sehari-hari.

f. Beban keluarga

Semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak pula tuntutan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang mempunyai anggota keluarga yang banyak jika tidak dibarengi dengan usaha peningkatan pendapatan akan meyebabkan keluarga tersebut berada pada garis kemiskinan.

Beberapa cara dalam memerangi kemiskinan di pedesan didalam (Kuncoro,2014:246) dijelaskan bahwa. Pertama, mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan *(idle)* dalam rumah tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di perdesaan. Petani kecil dan gurem merupakan sumber daya yang tersembunyi dan merupakan potensi gabungan. Kedua, dapat dilakukan dengan cara menyusun kerangka kelembagaan di perdesaan yang memungkinkan tenaga kerja yang belum didayagunakan untuk pemupukan modal .

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Yuniana Pertiwi yang berjudul Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, dengan dibuatnya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo masih belum mampu untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, baik yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia (SDM) dan juga pasrtisipasi masyarakat. kondisi ini diperparah lagi dengan masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya penanggulangan kemiskinan dan adanya suatu program penngentasan

kemiskinan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal ini diterbitkan oleh Pandecta. Volume 9. Nomor 2. Desember 2014 ISSN 1907-8919.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abu Huraerah dengan judul Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah dalam menangani kemiskinan. Peran yang seharusny menjadi tanggungjawab berbagai pihak dalam menyusun dan melakukan perencanaan sejatinya dapat dilaksanakan sebaik mungkin demi tercapainya kesejahteraan bersama. Namun, dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu dilihat dampak atau perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah. Dalam hal ini pemerintah hendaknya memperhatikan strategi kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat. Jika terjadi kesalahan strategi penanggulangan kemiskinan berakibat pada tidak efektifnya sebuah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati Tabanan dengan judul Faktor-kaktor Penyebab Kemiskinan Kultural dan Model Pengentasan Berbasis Kearifan Lokal: Studi pada Masyarakat Miskin di Pegunungan Kintamani, Bali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan kultural dengan mengembangkan model pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal, yaitu nilai-nilai agama Hindu Tat Twam Asi pada masyarakat kawasan wisata Kintamani. Setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat rerata 11%

pada lima tahun terakhir, yang seharusnya berdampak pada peningkatan pendapatan sebagai efek ikutannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya bahwa masyarakat di kawasan wisata Kintamani tetap miskin, mencapai angka 6,80% di atas angka kemiskinan. Dimuat dalam Jurnal Kajian Bali Vol. 06, No. 02, Oktober 2016.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Azwardi Sukanto dengan judul Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bila dilihat dari jumlah yang disalurkan hingga tahun 2012 belum satu pun yang memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai). Namun, daerah yang telah melakukan penyaluran ADD menunjukkan peningkatkan, bila tahun 2006 sebesar 35,71%, meningkat menjadi 90% ditahun 2012. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Juni 2014 Volume 12, No.1 hal: 29 – 41 ISSN 1829-5843.
5. Penelitian yang diakukan oleh Imron Rosyadi dengan judul Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dalam Perspektif Struktural. Pengukuran kemiskinan mengacu pada konsep yang diterapkan BPS, yakni mengggunakan model Garis Kemiskinan (GK). Hasil penelitian ini adalah hasil pengujian goodness of fit yang menunjukkan bahwa variabel independen (GKRT, PKRT, JART, DD, ATP, SE, SBH, KLL, KTP dan PU) dapat diandalkan sebagai model estimator bagi variabel dependen

(Tingkat Kemiskinan). Hasil pengolahan regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) variabel independen, terdapat 2 (dua) variabel independen yang belum berpengaruh signifikan pada derajat kemiskinan, yaitu GKRT dan JART. Jurnal ini di terbitkan oleh *University Research Colloqium.* ISSN 2407-91

6. Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Mandala Putra dan Azhar Abbas dengan judul Proverty Reduction Program Evaluation In Batam City. Research results Show problem first, poverty alleviation program interventions cannot be reduced poverty in Batam. Second, the target group feels their life is better after receiving poverty alleviation program. Third, the target group continues to live in poverty. in order toout of poverty. Fourth, the target group has resigned itself to living in poverty. Although the amount of money, goods, or services they received cannot yet be fulfilled throughout their daily lives. Fifth, several target groups (low-income families) give up on poverty because they think poverty is that destiny cannot be changed. Proceddings IAPA Annual Conferense: Them 5 2019.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni, Nasir, Asrian dengan judul Dampak Pemekaran Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur. Hasil penelitian menunjukkan Dampak dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari jumlah ketersediaan sarana pendapatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan yang cukup meningkat dari tahun sebelum pemekaran

dan sesudah pemekaran. Pada tingkat pendapatan masyarakat menunjukkan hasil yang meningkat yakni memiliki pendapatan tambahan setiap bulannya jika di bandingkan dengan sebelum adanya pemekaran. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1. No. 1. Juli-Desember 2019, hlm 34-43

2.7 Kerangka Pemikiran

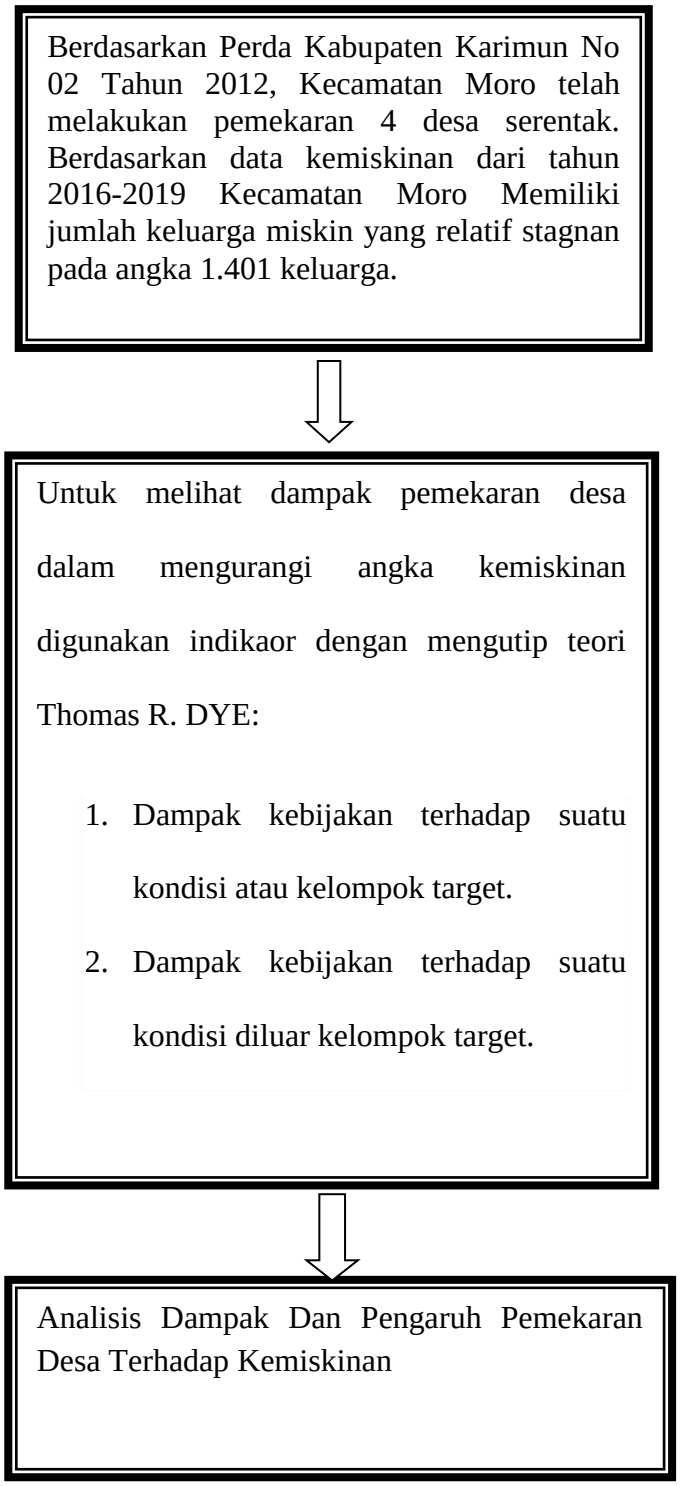

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Penelitian kulitatif ini berupaya mengungkapkan kejadian atau fakta di lapangan dengan menyuguhkan apa yang sebrnarnya terjadi dengan menguraiakan data yang bersangkutan. Serta melihat pandangan dalam suatu masyarakat terhadap kondisi pada saat ini, dan melihat perbedaan antar fakta yang ada dan pengaruhnya bagi suatu kondisi dilingkungan masyarakat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Di Kecamatan Moro. Penelitian ini dilakukan dengan menentukan fokus penelitian dengan kriteria desa *pertama,* desa dengan jumlah persentase keluarga miskin tertinggi *kedua,* desa yang memiliki persentase jumlah keluarga miskin paling rendah dan *ketiga,* desa yang paling baru dimekarkan. Lokasi ini dipilih karena untuk melihat sejauh mana dampak kebijakan pemekaran desa yang telah dilakukan ini dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan melihat kondisi desa paling miskin, paling sejahtra dan paling baru dimekarkan. Dampak kebijakan ini dilihat dari beberapa sudut dengan mengutip teori Thomas R. Dye diantaranya:

a. Dampak Kebijakan Terhadap Suatu Kondisi Atau Kelompok Target.

Objek yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat miskin yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan di Kecamatan Moro yang juga merupakan informan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan hak-hak dasar masyarakat miskin, pendidikan, sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat setempat.

b. Dampak Kebijakan Pada Kelompok Diluar Target Sasaran

Fokus disini adalah melihat bagaimana dampak pemekaran yang diterima oleh masyarakat diluar target sasaran atau masayarakat yang perekonomiannya sudah membaik.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan informasi yang didapat dari narasumber atau informan. Narasumber yang ditunjuk dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling,* pemilihan informan pada teknik ini dilakukan dengan ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. kriteria narasumber atau informan yang di pilih dapat dilihat berikut ini :

1. Informan benar-benar memahami permasalahan, serta ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang merupakan sasaran penelitian ini. Dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan.

2. Informan masih berperan aktif dalam kegiatan yang akan diteliti.
3. Informan mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan dalam memberikan infomasi tidak cenderung mengolah informasi. Dalam artian cenderung informan bersifat jujur dan nyata tanpa diolah dan dibuat-buat.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dapat berupa dokumen (arsip), diantaranya buku, praturan perundang-undangan, jurnal dan sumber arsip lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari data *empiris* dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini dijelaskan Nasution (Sugiyono, 2016:222) meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

a. Memasuki langsung lokasi penelitian *(getting in)*
b. Berada dilokasi penelitian *(getting along)*
c. Pengumpulan data *(logging data).*

Ada tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara mendalam, merupakan interaksi langsung antara peneliti dan informan, untuk mendapat informasi dan gambaran guna memperoleh informasi yang dibutuhkan, hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi saja. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan yang berada dan menetap di kecamatan Moro yang memang benar-

benar mengetahui dan mersakan langsung dampak kebijakan ini. Berikut daftar nama yang dijadikan nara sumber adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	**NAMA**	**JABATAN**	**ALASAN PEMILIHAN INFORMAN**
1	Rajab	KADES Desa Niur Permai	Sebagai kepala desa yang ikut serta menangani masalah kemiskinan dan paham akan masalah kemiskinan yang ada didaerahnya.
2	Sahlan	KADES Pulau Moro	Sebagai kepala desa yang ikut serta menangani masalah kemiskinan dan paham akan masalah kemiskinan yang ada didaerahnya.
3	Syahrudi	KADES Buluh Patah	Sebagai kepala desa yang ikut serta menangani masalah kemiskinan dan paham akan masalah kemiskinan yang ada didaerahnya.

4	Romi	Kepala Dusun Pulau Moro	Sebagai kepala dusun dan pengamat yang ada di desa yang tau kondisi dan keadaan perkonomian masyarakat setempat yang ada di daerahnya.
5	Rizal	Anggota BPD Desa Niur Permai	Sebagai kepala dusun dan pengamat yang ada di desa yang tau kondisi dan keadaan perkonomian masyarakat setempat yang ada di daerahnya.
6	Raju	Anggota BPD Desa Buluh Patah	Sebagai salah satu anggota BPD yang tau kondisi dan keadaan perkonomian masyarakat setempat yang ada di daerahnya.
7	Arsad	Tokoh Adat Desa Pulau Moro	Sebagai tokoh adat dan pengamat yang bersifat netral yang mengerti dan paham tentang kondisi

			dan keadaan kemiskinan di lingkungan wilayahnya.
8	Sulardi	Tokoh Adat Desa Niur Permai	Sebagai tokoh adat dan pengamat yang bersifat 8netral yang mengerti dan paham tentang kondisi dan keadaan kemiskinan di lingkungan wilayahnya.
9	Samsuden	Tokoh Adat Desa Buluh Patah	Sebagai tokoh adat dan pengamat yang bersifat netral yang mengerti dan paham tentang kondisi dan keadaan kemiskinan di lingkungan wilayahnya.
10	Yanti	Sebagai masyarakat miskin di Desa Buluh Patah	Sebagai masayarakat miskin yang merupakan sasaran kebijakan yang terlibat langsung dalam merasakan dampak dari pemekaran desa.

11	Samsul	Sebagai Masayarakat Miskin	Sebagai masayarakat miskin yang merupakan sasaran kebijakan yang terlibat langsung dalam merasakan dampak dari pemekaran desa.
12	Kiman	Mayarakat Miskin	Sebagai masayarakat miskin yang merupakan sasaran kebijakan yang terlibat langsung dalam merasakan dampak dari pemekaran desa.
13	Rian	Masyarakat Di Luar Target Sasaran Kebijakan di Desa Pualau Moro	Sebagai masyarakat diluar sasaran kebijakan yang terlibat langsung dalam merasakan dampak dari kebijakan.

14	Misnarti	Mayarakat Di Luar Target Sasaran Kebijakan di Desa Niur Permai	Sebagai masayarakat sasaran kebijakan yang terlibat langsung dalam merasakan dampak dari kebijakan.
15	Rais	Mayarakat Di Luar Target Sasaran di Desa Buluh Patah	Sebagai masayarakat sasaran kebijakan yang terlibat langsung dalam merasakan dampak dari kebijakan.
16	Amad	KASI PMD (Kepala Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Sebagai organisasi yang ikut serta dan terlibat langsung dalam melakukan pemberdayaan masayarakat pedesaan di wilayah Kecamatan Moro

1. Obsevasi, istilah observasi mengarah pada kegiatan melihat dan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang berkaitan dengan penelitian dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-induvidu di lokasi penelitian.

2. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, foto sebagai bahan tambahan untuk penelitian

3.4 Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 246-247), bahwa dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas, sehingga mendapatkan data dengan hasil yang sama atau biasa disebut data jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini meliputi:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

   Untuk mendapatkan data yang jelas maka dilakukannya reduksi data, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan potonya. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Displey (Penyajian Data)

   Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang biasa digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif biasa berbentuk teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, kausal, hipotesis atau teori.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Gunawan, 2013: 141), secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu:

1. Observasi. Peneliti melakukan observasi dengan secara langsung datang ke beberapa desa melihat kondisi lingkungan dan msayrakat sekitar.
2. Wawancara merupakan interaksi dua orang untuk bertukar informasi dan melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala–kepala desa masyarakat setempat dan orang-orang yang paham betul perkembangan kebijakan pemekaran ini sekaligus berdomisili di lokasi penelitian.
3. Dokumentasi. Dokumen merupakan catataan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, lisan, atau karya-karya monumental, sebagai bahan dan informasi tambahan bagi peneliti.

3.6 Keabsahan Data

Merupakan salah satu cara penting dan mudah dalam menguji keabsahan hasil penelitian dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data. Adapun menurut (Sugiyono, 2016:270) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji kredibilitas/kepercayaan terhadap data penelitian antara lain dengan :

a. Perpanjangan waktu pengamatan dengan melakukan penelitian kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru
b. Menggunakan bahan referensi, hasil pengamatan yang didukung dengan gambar dan foto
c. Triangulasi, teknik pengumpulan dengan melakukan pemanfaatan informasi diluar data guna untuk pembandingan atau pengecekan terhadap data itu sendiri.

2. Uji Transferability

   Setelah menyusun laporan peneliti harus memberikan uraian dengan jelas, sistematis dan dapat dipercaya

3. Pengujian Depenability

   Audit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Pengujian Konfirmability

   Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

a) Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dengan studi kasus di beberapa desa yang diambil berdasarkan kriteria tertentu. Dengan mengingat keterbatan dana waktu serta sulitnya dijangkau wilayah antar desa karna wilayah ini juga berbentuk kepulauan. Maka penulis memilih tiga desa

diantaranya *pertama*, Desa Pulau Moro, Desa Niur Permai, Desa Buluh Patah Ketiga lokasi ini dipilih karena sesuai dengan permaslahan yang diangkat dan mendukung agar penelitian ini dapat dilakukan

b) Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Oktober 2019				November 2019				Desember 2019				Januari 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Pustaka																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Pengumpulan Data																
4.	Penelitian Lapangan																
5.	Pengolahan Data																
6.	Analisis dan Kesimpulan																
7.	Penulisan Laporan Akhir																
8	Penyerahan Laporan																